

## Pemikiran dan Gerakan Perempuan di Indonesia

### Catatan Jurnal Perempuan

Pemikiran dan Gerakan Perempuan di Indonesia

### Artikel

Tutur Perempuan Komunitas Anti Tambang di Sumba: Sebuah Narasi Gerakan Subaltern untuk Kedaulatan Pangan  
*Titiek Kartika Hendrastiti*

Aksi Kolektif Perempuan untuk Pemberdayaan di Indonesia  
*Anne Lockley, Lies Marcoes, Kharisma Nugroho & Abby Gina*

Analisis Anggaran Responsif Gender pada Program Perlindungan Sosial di Indonesia: Studi Kasus di Dua Kabupaten dan Kota  
*Akhmad Misbakhul Hasan, Betta Anugrah & Andi Misbahul Pratiwi*

Gerakan Perempuan Politik Setelah 20 Tahun Reformasi di Indonesia  
*Aditya Perdana dan Delia Wildianti*

Keterpaduan Layanan yang Memberdayakan: Hasil Asesmen P2TP2A di 16 Provinsi  
*Retno Agustin, Indriyati Suparno, Samsidar & Bella Sandiata*

Peran Perempuan dalam Pertanian di Jawa Tengah: Studi Kasus Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah  
*Linda Susilowati dan Petsy Jessy Ismoyo*

Kebaruan Politik dan Hukum Sebagai Sumbangan Gerakan Perempuan dalam Advokasi Kebijakan Afirmatif Pemilu dan UU PKDRT  
*Anita Dhewy dan Bella Sandiata*

Diterbitkan oleh:

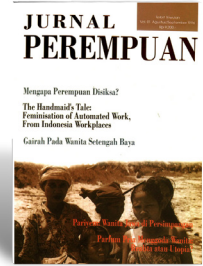
YAYASAN  
**YJP**  
JURNAL  
PEREMPUAN

Yayasan Jurnal Perempuan  
No. Akreditasi: 748/Akred/P2MI-LIPI/04/2016

# Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya berolah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

**- Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia  
No. Rekening 127-00-2507969-8**

(Mohon bukti transfer diemail ke [ima@jurnalperempuan.com](mailto:ima@jurnalperempuan.com))

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: **[www.jurnalperempuan.org](http://www.jurnalperempuan.org)**

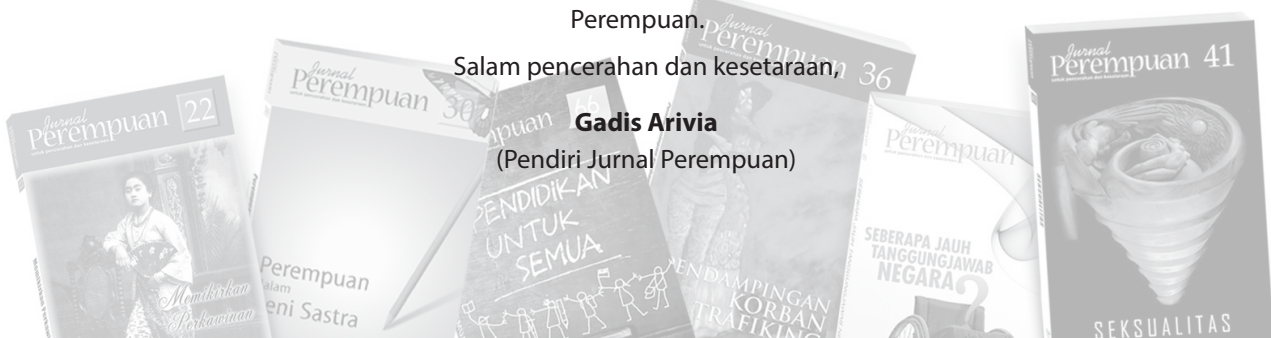
Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah (Hp 081807124295,  
email: [ima@jurnalperempuan.com](mailto:ima@jurnalperempuan.com)).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami [www.jurnalperempuan.org](http://www.jurnalperempuan.org) dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan

**Gadis Arivia**

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

**PENDIRI**

Dr. Gadis Arivia  
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno  
Ratna Syafrida Dhanny  
Asikin Arif (Alm.)

**DEWAN PEMBINA**

Dr. Gadis Arivia  
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno  
Mari Elka Pangestu, Ph.D.  
Svida Alisjahbana

**DIREKTUR EKSEKUTIF**

Dr. Atnike Nova Sigirow

**PEMIMPIN REDAKSI**

Anita Dhewy, M.Si.

**DEWAN REDAKSI**

Dr. Atnike Nova Sigirow (Pascasarjana Diplomasi,  
Universitas Paramadina)  
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum  
Feminisme, Universitas Indonesia)  
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University  
California at Berkeley)  
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer,  
Universiteit van Amsterdam)  
Prof. Dr. Musdah Mulia (Pemikiran Politik Islam &  
Gender, UIN Syarif Hidayatullah)  
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL  
Universitas Indonesia)  
Mariana Amiruddin, M.Hum. (Komisi Nasional Anti  
Kekerasan terhadap Perempuan)  
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty  
of Arts, Monash University)  
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik  
Perempuan, SOAS University of London)

**EDITOR TAMU**

Astutik Supraptini, M.A. (Program MAMPU)

**MITRA BESTARI**

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender,  
Universitas Indonesia)  
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Ford Foundation)  
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas  
Airlangga)  
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas  
Indonesia)  
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas  
Indonesia)  
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan,  
University of Melbourne)  
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern  
University)  
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)  
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies  
University of Western Australia)  
Prof. Kim Eun Shil (Antropologi & Gender, Korean Ewha  
Womens University)  
Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender,  
Carleton University)  
Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet  
Marburg)

Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan  
Masyarakat & Gender, Auckland University of  
Technology)

Dr. Wening Udasromo (Budaya, Bahasa & Gender,  
Universitas Gajah Mada)

Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama  
University)

Dr. Antarini Pratiwi Arna (Hukum & Gender, Indonesian  
Scholarship and Research Support Foundation)

Dr. Widjajanti M Santoso (Gender, Sosiologi & Media,  
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)

Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo (Hukum & Gender,  
Universitas Indonesia)

Franscia Saveria Sika Ery Seda, Ph.D. (Sosiologi,  
Gender & Kemiskinan, Universitas Indonesia)

Ruth Indiah Rahayu, M. Fil. (Sejarah, Gender & Filsafat,  
Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara)

Prof. Maria Lichtmann (Teologi Kristen dan Feminisme,  
Appalachian State University, USA)

Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University  
California, Riverside)

Assoc. Prof. Mun'im Sirry (Teologi Islam & Gender,  
University of Notre Dame)

Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender,  
Universiteit van Amsterdam)

Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender,  
Goethe University Frankfurt)

Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia &  
Gender, University of Copenhagen)

**REDAKSI PELAKSANA**

Andi Misbahul Pratiwi, M.Si.

**SEKRETARIS REDAKSI**

Abby Gina Boangmanalu, M.Hum.

**REDAKSI**

Bella Sandiata, M.H.

Iqraa Runi Aprilia

**SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN**

Himah Sholihah  
Gery Andri Wibowo  
Hasan Ramadhan

**DESAIN & TATA LETAK**

Dina Yulianti

**ALAMAT REDAKSI :**

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A, Jati Padang  
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540  
Telp./Fax (021) 2270 1689  
E-mail: [yjp@jurnalperempuan.com](mailto:yjp@jurnalperempuan.com)  
[redaksi@jurnalperempuan.com](mailto:redaksi@jurnalperempuan.com)

**WEBSITE:**

[indonesianfeministjournal.org](http://indonesianfeministjournal.org)

Cetakan Pertama, Februari 2019

**MAMPU** | Kemitraan Australia - Indonesia  
untuk Kesetaraan Gender  
dan Pemberdayaan Perempuan



**FORDFOUNDATION**

## Daftar Isi

### Catatan Jurnal Perempuan

Pemikiran dan Gerakan Perempuan di Indonesia / <i>Indonesian Feminists' Discourse and Politics</i> .....	iii
--	-----

### Artikel

- Tutar Perempuan Komunitas Anti Tambang di Sumba: Sebuah Narasi Gerakan Subaltern untuk Kedaulatan Pangan / *Oral Story of Women's Anti-mining Group in Sumba: A Narrative of Subaltern Movement for Food Sovereignty* ..... 1-12  
*Titiek Kartika Hendrastiti*
- Aksi Kolektif Perempuan untuk Pemberdayaan di Indonesia / *Women's Collective Action for Empowerment in Indonesia* ..... 13-26  
*Anne Lockley, Lies Marcoes, Kharisma Nugroho & Abby Gina*
- Analisis Anggaran Responsif Gender pada Program Perlindungan Sosial di Indonesia: Studi Kasus di Dua Kabupaten dan Kota / *Gender-Responsive Budget Analysis on Social Protection Programs in Indonesia: A Case Study in Two Districts and A City* ..... 27-42  
*Akhmad Misbahul Hasan, Betta Anugrah & Andi Misbahul Pratiwi*
- Gerakan Perempuan Politik Setelah 20 Tahun Reformasi di Indonesia / *Women Political Movements After 20 Years of Reformasi in Indonesia* ..... 43-52  
*Aditya Perdana dan Delia Wildianti*
- Keterpaduan Layanan yang Memberdayakan: Hasil Asesmen P2TP2A di 16 Provinsi / *Integrated Service for Empowerment: The Assessment of P2TP2A in 16 Provinces*..... 53-65  
*Retno Agustin, Indriyati Suparno, Samsidar & Bella Sandiata*
- Peran Perempuan dalam Pertanian di Jawa Tengah: Studi Kasus Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah / *Women's Role in Central Java Agriculture: A Case Study on Qaryah Thayyibah Peasants Association* ..... 67-76  
*Linda Susilowati dan Petsy Jessy Ismoyo*
- Kebaruan Politik dan Hukum Sebagai Sumbangan Gerakan Perempuan dalam Advokasi Kebijakan Afirmatif Pemilu dan UU PKDRT / *Political and Legal Novelty as the Contribution of Indonesian Women's Movement in the Advocacy on Affirmative Policy in Election and Law on the Abolition of Domestic Violence* ..... 77-87  
*Anita Dhewy dan Bella Sandiata*

JP edisi ini diterbitkan oleh Yayasan Jurnal Perempuan dengan dukungan dari Kemitraan Australian-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU). Program MAMPU merupakan inisiatif bersama antara Pemerintah Australia dan Indonesia bertujuan untuk meningkatkan akses perempuan miskin di Indonesia ke layanan penting dan program pemerintah lainnya dalam rangka mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis dan tidak mewakili pandangan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia.

# Pemikiran dan Gerakan Perempuan di Indonesia

## *Indonesian Feminists' Discourse and Politics*

Reformasi politik pada tahun 1998 telah membawa angin perubahan pada situasi politik di Indonesia, setidaknya dari sistem otoriter menuju demokrasi, dari sistem pemerintahan yang tersentralisasi menjadi terdesentralisasi, dan dari supremasi militer ke supremasi sipil. Perubahan ini membawa implikasi bagi gerakan sosial politik di Indonesia termasuk gerakan perempuan.

Gerakan perempuan Indonesia turut terlibat dan menjadi bagian penting dalam perjuangan reformasi. Lebih jauh gerakan perempuan bahkan membawa budaya politik baru yang berlandaskan pada etika kepedulian di tengah budaya politik yang maskulin. Hal ini tampak pada tindakan dan strategi yang diambil gerakan perempuan dalam menghadapi kerusuhan Mei 1998 dan konflik sosial dengan menggunakan isu SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan) di berbagai daerah.

Dalam udara reformasi, gerakan perempuan Indonesia juga menawarkan diskursus baru yang mendobrak pemisahan antara privat dan publik. Diskursus ini diwujudkan dalam kebijakan pro perempuan seperti Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di tahun 2004. Gerakan perempuan Indonesia juga telah memasukkan perumusan perempuan ke dalam agenda perpolitikan. Hal ini terlihat pada lahirnya kebijakan kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam Undang-undang Pemilu dan Undang-undang Partai Politik sejak tahun 2002. Di tataran kebijakan sejumlah undang-undang yang pro perempuan sudah disahkan meskipun dalam implementasinya masih kurang dan banyak catatan.

Singkatnya, setelah 20 tahun reformasi gerakan dan pemikiran perempuan terus berkembang. Perkembangan gerakan perempuan tersebut dapat dilihat dari kemunculan berbagai organisasi yang didirikan untuk menyuarakan dan membela kepentingan perempuan dalam berbagai isu, seperti keragaman identitas gender, disabilitas, perempuan adat, perempuan buruh migran, pekerja rumah tangga, dan masih banyak lagi.

Namun, dua puluh tahun sejak reformasi dicetuskan, persoalan mendasar yang telah diperjuangkan sejak

dulu masih dihadapi oleh kaum perempuan. Hingga kini kaum perempuan masih menghadapi persoalan mendasar seperti angka kematian ibu, perkawinan anak, perdagangan manusia, dan kesenjangan upah. Persoalan kekerasan dan diskriminasi berdasarkan gender masih terus berlanjut, seperti perkosaan dan pelecehan seksual, juga persekusi terhadap LGBT.

Perjuangan gerakan perempuan belum selesai hanya dengan munculnya berbagai peraturan dan kebijakan yang mengakomodasi ketidakadilan gender. Dalam udara reformasi juga memberikan ruang bagi munculnya konservatisme berbasis agama dan puritanisme yang melakukan kontrol dan pembatasan terhadap perempuan. Negara semakin memfasilitasi kecenderungan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan lewat peraturan daerah yang diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok marginal.

Dalam situasi tersebut, gerakan perempuan terus mencari bentuk dan pemikiran untuk mendorong agenda politik perempuan di ranah publik, mulai dari tingkat nasional hingga di akar rumput. Aksi kolektif perempuan adalah salah satu metode gerakan perempuan yang bertujuan untuk mengajukan tuntutan di ranah publik dengan tetap membawa identitas gender perempuan. Gerakan perempuan pun tak berhenti pada persoalan perempuan, tetapi juga merambah persoalan publik yang lebih luas, kelestarian lingkungan dan keadilan sosial. Artikel-artikel dalam Jurnal Perempuan edisi ini memperlihatkan upaya pemikiran dan gerakan perempuan untuk berjuang dalam berbagai ranah dan isu. Mulai dari gerakan basis di akar rumput hingga gerakan advokasi di level kebijakan. Mulai dari lingkup kecil di tataran desa hingga skala nasional.

Semua tindakan kolektif yang melibatkan aktor kolektif dan diskursus gender tersebut menegaskan gerakan perempuan punya dampak dan daya dorong bagi perubahan sosial yang penting bukan hanya bagi keluarga, tetapi juga komunitas, pemerintah, dan masyarakat secara luas. **(Anita Dhewy)**



Titiek Kartika Hendrastiti (Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bengkulu, Bengkulu, Indonesia)

**Tutur Perempuan Komunitas Anti Tambang di Sumba: Sebuah Narasi Gerakan Subaltern untuk Kedaulatan Pangan**

***Oral Story of Women's Anti-mining Group in Sumba: A Narrative of Subaltern Movement for Food Sovereignty***

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 1, Februari 2019, hal. 1-12, 1 tabel, 2 gambar, 15 daftar pustaka

This article analyzes the meaning of the anti-gold mining group oral story from Praikaroku Jangga Village, Central Sumba Regency, East Nusa Tenggara. This documentation is important to record the dynamics of the history of local women's movements in the post-reformation era Indonesia in 1998. This study uses a postcolonial feminist ethnographic approach. The female anti-gold mine forces identify as a subaltern movement, whose struggle goes beyond practicality rejecting the gold mining corporation operations. Their speeches about the movement show that the direction of their resistance leads to food independence and sovereignty from extractive business aggression. To maintain their space of life, the women's forces were only connected by words of experience and knowledge of adat and tradition. Postcolonial feminist ethnography explains the dis/interconnectivity between the interests of the state, political economic power, local-national-global. The construction of this anti-mining women's discourse shows the strength of women as agents in caring for natural resources.

Keywords: Central Sumba women's movement, food sovereignty, postcolonial feminist ethnography, subaltern, women's agency

Artikel ini menganalisis makna tutur komunitas anti tambang emas dari Desa Praikaroku Jangga, Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur. Pendokumentasian ini penting guna mencatat salah satu dinamika sejarah pergerakan perempuan lokal di Indonesia pasca Reformasi 1998. Studi ini menggunakan pendekatan etnografi feminis pascakolonial, yang analisisnya menggunakan pisau feminis pascakolonial. Pasukan perempuan anti tambang emas memiliki identitas sebagai gerakan subaltern, yang perjuangannya melampaui praksis menolak operasi korporasi tambang emas. Tutur mereka tentang gerakan menunjukkan bahwa arah perlawanan mereka menuju pada kemandirian dan kedaulatan pangan dari agresi bisnis ekstraktif. Untuk mempertahankan ruang hidupnya, pasukan perempuan tersebut hanya terhubung oleh tutur pengalaman dan pengetahuan adat dan tradisi. Etnografi feminis pascakolonial menjelaskan dis/interkonektivitas antara kepentingan negara, kekuatan ekonomi politik, lokal nasional global. Konstruksi diskursus perempuan anti tambang ini memperlihatkan kekuatan perempuan sebagai agen dalam merawat sumber daya alam.

Kata kunci: gerakan perempuan Sumba Tengah, kedaulatan pangan, etnografi feminis pascakolonial, subaltern, keagenan perempuan

Anne Lockley<sup>1</sup>, Lies Marcoes<sup>1</sup>, Kharisma Nugroho<sup>1</sup> & Abby Gina<sup>2</sup> (<sup>1</sup>Migunani, Yogyakarta, Indonesia; <sup>2</sup>Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

**Aksi Kolektif Perempuan untuk Pemberdayaan di Indonesia**

***Women's Collective Action for Empowerment in Indonesia***

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 1, Februari 2019, hal. 13-26, 7 tabel, 1 gambar, 6 daftar pustaka

Women's collective action has been used by women's group in Indonesia since early 20th century. The collective action of women in this study is defined as the formal or informal formation and activity of groups or networks of predominantly women that aim to bring about positive changes in women's lives. Eight case studies of women's collective actions discussed in this study reveal variety of backgrounds, motives and agencies in those collective actions. This variety exist due to the different and specific conditions and needs of each of the women's groups. The object of the study in this research were eight collective actions, namely: Balai Sakinah 'Aisyiyah (BSA), Serikat Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), Sekolah Perempuan, Koalisi Perempuan Indonesia Parepare branch, MUIWO, Kelompok Bunda Kreatif, Community Center, and Posko Lestari and Posko Mentari. The data of the research were collected through document review, surveys, and in-depth interviews. This research finds that the involvement of women in collective actions stem from gender inequality that they experience in their daily lives. Through the collective actions the women were empowered to strengthen their access to social services and legal protection. This research also finds there were growing understanding about the concept of gender inequality among the women who involved in the collective actions.

Keywords: women's collective action, empowerment, gender inequality, participation

Aksi kolektif perempuan telah banyak dilakukan oleh berbagai kelompok di berbagai wilayah di Indonesia sejak awal abad ke-20. Aksi kolektif perempuan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai pembentukan dan aktivitas formal maupun informal dari kelompok atau jejaring para perempuan yang bertujuan untuk membawa perubahan positif dalam kehidupan perempuan. Delapan studi kasus aksi kolektif perempuan yang dibahas dalam penelitian ini menunjukkan keragaman latar belakang, motif dan agen dalam aksi-kolektif. Hal ini disebabkan perbedaan kondisi dan kebutuhan tiap kelompok perempuan. Objek kajian dalam penelitian ini adalah delapan aksi kolektif di Balai Sakinah 'Aisyiyah, Serikat PEKKA, Sekolah Perempuan, Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Parepare, MUIWO, Kelompok Bunda Kreatif, Community Center dan Posko Lestari dan Mentari. Metode pengumpulan data dilakukan melalui kajian dokumen, survei dan wawancara mendalam. Riset ini menemukan bahwa ketidakadilan gender merupakan faktor yang mendorong keterlibatan para perempuan di dalam aksi kolektif. Melalui aksi kolektif para perempuan dapat memperkuat akses mereka terhadap layanan sosial dan perlindungan hukum. Melalui aksi kolektif juga ditemukan tumbuhnya pemahaman tentang ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan.

Kata kunci: aksi kolektif perempuan, pemberdayaan, ketimpangan gender, keterlibatan

Akhmad Misbakhul Hasan<sup>1</sup>, Betta Anugrah<sup>1</sup> & Andi Misbahul Pratiwi<sup>2</sup> (<sup>1</sup>Seknas FITRA, Jakarta, Indonesia; <sup>2</sup>Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

**Analisis Anggaran Responsif Gender pada Program Perlindungan Sosial di Indonesia: Studi Kasus di Dua Kabupaten dan Kota**

***Gender-Responsive Budget Analysis on Social Protection Programs in Indonesia: A Case Study in Two Districts and A City***

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 1, Februari 2019, hal. 27-42, 2 tabel, 6 grafik, 16 daftar pustaka

Presidential Instruction (Inpres) No. 9 of 2000 about Gender Mainstreaming is a mechanism to in National Development has impacts on the planning and implementation of public policy in Indonesia. Public policy becomes an important arena for the struggle to realize gender equality and justice. One of the government's commitments to this matter can be seen through Gender-Responsive Budgeting (GRB). This study analyses gender responsive budgeting in social protection programs in Indonesia, with case studies in three regions, namely Gunungkidul Regency, North Lombok Regency, and Padang City. Data collection is carried out by in-depth interviews and literature studies, including the Indonesian Budget and Regional Government Budget documents. This study conducted GRB analysis in three regions with three categories of budget expenditure analysis, namely specifically identified gender-based expenditure, equal employment opportunity expenditure, and mainstream budget expenditure. The results of the study show that in several regions there have been gender-responsive specific budget allocations for affirmation programs for women, children, the elderly, and disability. However, it can be seen that the budget and gender-specific expenditure are still centralized in services that are identical to women's affairs, and not yet mainstreamed in all of the budget allocation.

Keywords: Gender-Responsive Budget, Social Protection Program, Gunungkidul District, North Lombok District, Padang City, Budget Analysis

Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional memiliki dampak terhadap perencanaan dan implementasi kebijakan publik di Indonesia. Kebijakan publik menjadi arena penting bagi perjuangan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Komitmen pemerintah terhadap hal tersebut salah satunya dapat dilihat melalui Anggaran Responsif Gender (ARG). Penelitian ini menganalisis anggaran responsif gender pada program perlindungan sosial di Indonesia, dengan studi kasus di tiga wilayah yaitu, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Lombok Utara, dan Kota Padang. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan, termasuk dokumen APBN dan APBD. Penelitian ini melakukan analisis ARG di tiga wilayah tersebut menggunakan tiga kategori analisis belanja anggaran yaitu, specifically identified gender based-expenditure, equal employment opportunity expenditure, dan mainstream budget expenditure. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di beberapa daerah telah ada alokasi anggaran responsif gender untuk program afirmasi perempuan, anak, orang lanjut usia (lansia) dan difabel. Meski demikian, terlihat bahwa anggaran dan pengeluaran belanja spesifik-gender masih terpusat di dinas-dinas yang identik dengan urusan perempuan dan tidak menjadi arus utama dalam alokasi anggaran program perlindungan sosial.

Kata kunci: Anggaran Responsif Gender, Program Perlindungan Sosial, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Lombok Utara, Kota Padang, Analisis Anggaran Belanja

Aditya Perdana dan Delia Wildianti (PUSKAPOL LP2SP FISIP Universitas Indonesia, Depok, Indonesia)

**Gerakan Perempuan Politik Setelah 20 Tahun Reformasi di Indonesia**

***Women Political Movements After 20 Years of Reformasi in Indonesia***

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 1, Februari 2019, hal. 43-52, 1 tabel, 21 daftar pustaka

This article raises the important question of the achievements of women political movements after 20 years of reformasi in Indonesia. This article intends to elaborate on two main issues, namely the reasons underlying the women's political movement, which has stagnated, and the offer of a strategy that needs to be discussed to attract young women to politics. There are three main issues that are important concerns in the women's political movement after the 1998 Reformation. First, the character of civil society organizations and political parties in Indonesia has its own peculiarities. Second, there is a space of political interaction that has been sufficiently built between political parties and groups of NGOs and women's organizations. Third, in electoral competitions, one of the important issues that still need to be explored further is the effort to win female candidates and regional head candidates so that the number of women's representation can be achieved. Connectivity between millennials and political parties needs to be an important means to be carried out in the near future when parties feel the need for nominating women and their victory must be immediately overcome.

Keywords: gender and politics, elections, women's political representation

Pertanyaan penting yang diajukan artikel ini adalah bagaimana capaian gerakan perempuan politik pasca 20 tahun reformasi di Indonesia? Artikel ini hendak mengelaborasi dua hal utama yaitu alasan yang mendasari gerakan politik perempuan mengalami stagnasi dan menawarkan strategi yang perlu diperbincangkan guna menarik anak muda perempuan untuk berpolitik. Ada tiga hal utama yang menjadi perhatian penting dalam gerakan politik perempuan pasca Reformasi 1998. Pertama, karakter organisasi masyarakat sipil dan partai politik di Indonesia memiliki kekhasan tersendiri. Kedua, ada ruang interaksi politik yang sudah terbangun dengan cukup memadai antara partai politik dengan kelompok LSM dan ormas perempuan. Ketiga, dalam kompetisi elektoral di pemilu, salah satu persoalan penting yang masih perlu didalami lebih lanjut adalah usaha memenangkan caleg perempuan dan calon kepala daerah agar jumlah keterwakilan perempuan dapat tercapai. Konektivitas antara generasi milenial dengan partai politik perlu menjadi sarana yang penting untuk dilakukan dalam waktu dekat manakala partai merasa kebutuhan pencalonan perempuan dan kemenangannya harus segera diatasi.

kata kunci: gender dan politik, pemilu, keterwakilan politik perempuan

Retno Agustin, Indriyati Suparno<sup>1</sup>, Samsidar<sup>2</sup> & Bella Sandiata<sup>3</sup> (<sup>1</sup>KOMNAS Perempuan, Jakarta, Indonesia; <sup>2</sup>Forum Pengada Layanan, Indonesia; <sup>3</sup>Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

**Keterpaduan Layanan yang Memberdayakan: Hasil Asesmen P2TP2A di 16 Provinsi**

***Integrated Service for Empowerment: The Assessment of P2TP2A in 16 Provinces***

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 1, Februari 2019, hal. 53-65, 2 tabel, 5 Grafik, 8 daftar pustaka

The increasing number of violence against women every year raises question about the effectiveness of intergrated service programs for the women victims of violence. The government established the Integrated Service Center for Women and Children Empowerment (P2TP2A) in 2002 supported by National Commission on Violence against Women (KOMNAS Perempuan) in the effort to provide protection and empowerment of women victims of violence. However, the increasingly diverse forms of violence against women have resulted in complex needs of the victims. The question arises whether the function and performance role of P2TP2A has fully answered the needs of victims or not. This article focuses on assessments conducted by KOMNAS Perempuan and Forum Pengada Layanan (FPL) in 16 provinces to re-examine the role of P2TP2A's functions and performance in meeting the needs of victims. Based on the findings of the assessment, there are still shortcomings in the system and performance of P2TP2A in providing victims' needs, such as lack of awareness as service providers, coordination problems among institutions and limited budget. This assessment uses in-depth interviews and document studies, by including the lessons from the P2TP2A Surakarta city, Bandung district and Central Java Province.

Keywords: P2TP2A, victims, integrated service, violence against women

Angka kekerasan terhadap perempuan yang masih terus meningkat dari tahun ke tahun menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas dari program penanganan bagi perempuan korban kekerasan. Pemerintah telah mendirikan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) pada 2002 yang turut didukung Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan). P2TP2A didirikan dalam upaya memberikan perlindungan dan pemberdayaan terhadap perempuan korban kekerasan. Namun, bentuk kekerasan yang semakin beragam mengakibatkan kebutuhan perempuan korban semakin kompleks. Artikel ini berfokus pada asesmen yang dilakukan oleh KOMNAS Perempuan dan Forum Pengada Layanan (FPL) di 16 provinsi untuk memeriksa kembali peran fungsi dan kinerja P2TP2A dalam memenuhi kebutuhan korban. Berdasarkan temuan asesmen, masih terdapat kekurangan dari sistem dan kinerja P2TP2A dalam memberikan layanan kepada perempuan korban, seperti kurangnya kesadaran sebagai penyedia layanan, adanya masalah koordinasi antarlembaga, hingga anggaran yang terbatas. Asesmen ini menggunakan metode wawancara mendalam dan studi dokumen, dengan menyertakan pembelajaran dari P2TP2A Kota Surakarta, Kabupaten Bandung dan Provinsi Jawa Tengah.

Kata kunci: P2TP2A, perempuan korban, layanan terpadu, kekerasan terhadap perempuan

---

Linda Susilowati dan Petsy Jessy Ismoyo (Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia)

### **Peran Perempuan dalam Pertanian di Jawa Tengah: Studi Kasus Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah**

#### ***Women's Role in Central Java Agriculture: A Case Study on Qaryah Thayyibah Peasants Association***

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 1, Februari 2019, hal. 67-76, 18 daftar pustaka

This research proves the importance of the role of women in the agricultural sector in Central Java through a case study of the Peasants Union Society movement in Qaryah Thayyibah, Salatiga, Central Java. This research uses qualitative methods, with data collection techniques through literature studies, observations, FGDs and in-depth interviews. The analysis technique uses categorization, interpretation and conclusions from the results of data collection. This research shows that women have a key role in the development of the agricultural sector. Therefore SPPQT's programs for empowering female farmers include: (1) women's political education, (2) involvement of women in the Production Assembly and Peasants' Association, (3) Women's involvement in the Village Development Council (Team 11). The findings

also show obstacles to community resistance for the third point. This can be overcome again by SPPQT's vision, gender equality needs to be seen as a solution to improve the agricultural sector.

Keywords: the role of women, farmer groups, marginalization

Penelitian ini membuktikan pentingnya peran perempuan dalam sektor pertanian di Jawa Tengah lewat studi kasus gerakan Serikat Paguyuban Petani di Qaryah Thayyibah, Salatiga, Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi, FGD dan wawancara mendalam. Teknik analisis menggunakan kategorisasi, interpretasi dan kesimpulan dari hasil pengumpulan data. Penelitian ini memperlihatkan perempuan mempunyai peran kunci dalam pembangunan sektor pertanian. Oleh karena itu program yang dijalankan SPPQT untuk pemberdayaan perempuan petani meliputi: (1) pendidikan politik perempuan, (2) keterlibatan perempuan dalam Jamaah Produksi dan Paguyuban Tani, (3) Pelibatan perempuan dalam Dewan Pembangunan Desa (Tim 11). Temuan juga memperlihatkan kendala adanya penolakan dari masyarakat untuk poin ketiga. Hal ini dapat diatasi dengan kembali pada visi SPPQT, kesetaraan gender perlu dilihat sebagai solusi untuk meningkatkan sektor pertanian.

Kata kunci: peran perempuan, kelompok tani, marginalisasi

---

Anita Dhewy & Bella Sandiata (Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

### **Kebaruan Politik dan Hukum Sebagai Sumbangan Gerakan Perempuan dalam Advokasi Kebijakan Afirmatif Pemilu dan UU PKDRT**

#### ***Political and Legal Novelty as the Contribution of Indonesian Women's Movement in the Advocacy on Affirmative Policy in Election and Law on the Abolition of Domestic Violence***

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 1, Februari 2019, hal. 77-87, 10 daftar pustaka

This article discusses the novelty of the women's movement in encouraging women's political representation and advocating for the elimination of domestic violence. Data is obtained through interviews with actors involved in the women's movement, especially actors from civil society organizations. The results of the study show that the women's movement in the Advocacy on Affirmative Policy in Election becomes a sign of the inclusion of women in the political agenda. While the women's movement in the advocacy for Law on the Abolition of Domestic Violence dismantles private and public dichotomies that are detrimental to women in the context of domestic violence. This study also shows that women's movements need strong concepts, adaptive strategies and synergies with various elements to be able to push the women's agenda and encourage change.

Keywords: women's movement, women's political representation, affirmative action, Law on the Abolition of Domestic Violence

Artikel ini membahas kebaruan yang dihasilkan gerakan perempuan dalam mendorong keterwakilan politik perempuan dan advokasi penghapusan KDRT. Data diperoleh melalui wawancara terhadap para aktor yang terlibat dalam gerakan perempuan, khususnya para aktor dari organisasi masyarakat sipil. Hasil kajian memperlihatkan gerakan perempuan untuk advokasi kebijakan afirmatif pemilu menjadi penanda masuknya perumusan perempuan dalam agenda perpolitikan. Sementara gerakan perempuan untuk advokasi UU PKDRT membongkar dikotomi privat dan publik yang merugikan perempuan dalam konteks kekerasan di ranah domestik. Kajian ini juga menunjukkan gerakan perempuan membutuhkan konsep yang kuat, strategi yang adaptif dan sinergi dengan berbagai elemen untuk dapat mendesak agenda perempuan dan mendorong perubahan.

Kata kunci: gerakan perempuan, keterwakilan politik perempuan, tindakan afirmatif, UU PKDRT



## Tutur Perempuan Komunitas Anti Tambang di Sumba: Sebuah Narasi Gerakan Subaltern untuk Kedaulatan Pangan

### *Oral Story of Women's Anti-mining Group in Sumba: A Narrative of Subaltern Movement for Food Sovereignty*

**Titiek Kartika Hendrastiti**

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bengkulu Jl. WR. Supratman,  
Kandang Limum, Bengkulu, Indonesia, 38000

titiek\_kartika@unib.ac.id

Kronologi Naskah: diterima 7 Januari 2019, direvisi 20 Februari 2019, diputuskan diterima 26 Februari 2019

#### Abstract

This article analyzes the meaning of the anti-gold mining group oral story from Praikaroku Jangga Village, Central Sumba Regency, East Nusa Tenggara. This documentation is important to record the dynamics of the history of local women's movements in the post-reformation era Indonesia in 1998. This study uses a postcolonial feminist ethnographic approach. The female anti-gold mine forces identify as a subaltern movement, whose struggle goes beyond practicality rejecting the gold mining corporation operations. Their speeches about the movement show that the direction of their resistance leads to food independence and sovereignty from extractive business aggression. To maintain their space of life, the women's forces were only connected by words of experience and knowledge of adat and tradition. Postcolonial feminist ethnography explains the dis/interconnectivity between the interests of the state, political economic power, local-national-global. The construction of this anti-mining women's discourse shows the strength of women as agents in caring for natural resources.

Keywords: Central Sumba women's movement, food sovereignty, postcolonial feminist ethnography, subaltern, women's agency

#### Abstrak

Artikel ini menganalisis makna tutur komunitas anti tambang emas dari Desa Praikaroku Jangga, Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur. Pendokumentasian ini penting guna mencatat salah satu dinamika sejarah pergerakan perempuan lokal di Indonesia pasca Reformasi 1998. Studi ini menggunakan pendekatan etnografi feminis pascakolonial, yang analisisnya menggunakan pisau feminis pascakolonial. Pasukan perempuan anti tambang emas memiliki identitas sebagai gerakan *subaltern*, yang perjuangannya melampaui praksis menolak operasi korporasi tambang emas. Tutur mereka tentang gerakan menunjukkan bahwa arah perlawanan mereka menuju pada kemandirian dan kedaulatan pangan dari agresi bisnis ekstraktif. Untuk mempertahankan ruang hidupnya, pasukan perempuan tersebut hanya terhubung oleh tutur pengalaman dan pengetahuan adat dan tradisi. Etnografi feminis pascakolonial menjelaskan dis/interkoneksi antara kepentingan negara, kekuatan ekonomi politik, lokal nasional global. Konstruksi diskursus perempuan anti tambang ini memperlihatkan kekuatan perempuan sebagai agen dalam merawat sumber daya alam.

Kata kunci: gerakan perempuan Sumba Tengah, kedaulatan pangan, etnografi feminis pascakolonial, subaltern, keagenan perempuan

#### Pendahuluan

Sejarah merupakan catatan rezim dan mengesampingkan kehidupan perempuan. Banyak sejarah perjuangan hidup perempuan, apalagi di tingkat lokal yang hilang dari sejarah di Indonesia (Irianto & Hendrastiti 2015). Cerita perempuan dalam sejarah untuk mengukuhkan posisi laki-laki dan maskulinitas. Catatan gerakan perempuan Indonesia juga tak banyak diketahui khalayak internasional, tidak banyak diproduksi dalam bahasa asing (Martyn 2005; Blackburn 2010).

Identitas gerakan perempuan lingkungan memelopori gerakan di luar isu arus utama (*mainstream*). Bagusnya, gerakan perempuan lingkungan dari berbagai kawasan Indonesia itu memperlihatkan interkoneksi dengan isu gerakan arus utama. Gerakan lingkungan berkelindan dengan isu kesehatan, pendidikan, kemiskinan, ketidakadilan akses publik perempuan, perdagangan anak, perkawinan anak, kematian ibu dan bayi, serta isu kritis lain. Gerakan lokal ini tidak ada sangkut pautnya dengan ide-ide feminisme global.

Gerakan perempuan lokal perlu perumusan. Salah satu identitasnya adalah berseberangan dengan negara. Sama seperti posisi gerakan sosial, perempuan anti tambang melihat negara lebih dekat kepada korporasi dan kekuatan yang menghancurkan sumber daya alam. Operasi negara terhadap komunitas lokal beragam, sebagian besar dalam bentuk dukungan pemerintah lokal kepada korporasi. Gerakan perempuan untuk isu lingkungan menunjukkan fenomena yang berbeda dari identitas gerakan perempuan urban di abad ke-20, yang ditemukan oleh Blackburn (2010) sebagai dominan bernuansa Jawa. Rumusan kerusakan lingkungan dan penjarahan sumber daya alam terhubung dengan ketubuhan. Kehancuran, eksploitasi, dan bencana adalah ancaman bagi tubuh perempuan (Hendrastiti 2014; Irianto & Hendrastiti 2015).

Konteks gerakan perempuan dalam artikel ini adalah gerakan anti tambang emas dari Desa Praikaroku Jangga, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur. Kawasan tambang emas yang menjadi wilayah konflik ini berada di perbukitan Paleti Alira. Suatu perbukitan padang rumput yang biasa disebut sebagai bukit emas, bukit bercahaya oleh masyarakat setempat; bukit itu akan memancarkan sinarnya saat bulan purnama (Hendrastiti 2018a). Sejak awal eksplorasi pada tahun 2011, posisi masyarakat setempat terbelah, pro dan kontra terhadap kedatangan PT Fathi Resources. Puncak bentrok melawan perusahaan adalah ketika aktivitas eksplorasi memasuki kawasan batu kubur keluarga bangsawan setempat. Saat itulah terjadi perusakan peralatan, mata bor, dan generator milik perusahaan yang sedang melakukan eksplorasi di kawasan Padang Rua Awa, Desa Praikaroku Jangga ("Warga Serang Pekerja Tambang Emas di Sumba Tengah" 2011).

Perlawanan makin berani, posisi kelompok kontra makin kuat, dan kelompok perempuan mulai ambil bagian dalam gerakan, terutama pasca penangkapan pimpinan anti tambang. Keterlibatan kelompok perempuan dalam gerakan anti tambang emas ini memang tidak begitu lama, kurang lebih dua tahun. Tetapi proses perlawanan mereka hingga saat ini masih menjadi spirit berkembangnya kesadaran kritis. Bukan hanya terdapat penguatan semangat melindungi warisan leluhur dan lingkungan, tetapi kebangkitan merumuskan identitas mereka sebagai perempuan Sumba dan perawat alam adalah respons terhadap tindak membahayakan lingkungan (Hendrastiti 2018a).

Melalui gerakan lingkungan, perempuan berhasil merumuskan pembebasan tubuh dan

spiritnya. Pembebasan itu bersifat komprehensif dan pembebasan itu melintas batas (*beyond*) kekuasaan negara dan korporasi. Rumusan pembebasan diri dari ketergantungan sumber daya "pendatang" menunjukkan suatu rumusan perempuan tentang kedaulatan pangan. Secara tradisional, pangan dikonstruksi sebagai area dominan perempuan.

Bacaan pustaka menunjukkan bahwa kategorisasi gerakan perempuan di Indonesia, yang pernah dibahas oleh Blackburn (2010) ada tiga basis: (1) prinsip keagamaan dan non keagamaan; (2) kelas—perempuan dari keluarga miskin, atau kelas menengah ke atas; dan (3) geografis—perkotaan atau perdesaan. Gerakan perempuan untuk isu lingkungan, agak sulit masuk ke dalam tiga kategorisasi di atas. Blackburn telah memprediksi akan munculnya gerakan komunitas perempuan yang berada di luar tiga kategori tersebut. Meski ia hanya menyebutkan *niché* gerakan di luar tiga kategori tersebut sebagai: buruh tani, perempuan dari daerah terpencil, perempuan Cina, perempuan disabilitas, dan perempuan lanjut usia; sedangkan identitas gerakan untuk isu lingkungan mungkin sebagai isu lintas sektoral. Yang terpenting dari tulisan Blackburn adalah identitas merupakan isu sentral dalam sejarah gerakan perempuan.

Dari referensi lain, gerakan perempuan untuk isu lingkungan juga belum masuk pada uraian identitas (Martyn 2005). Martyn merangkum tiga identitas gerakan perempuan: (1) agensi pada partisipasi perempuan dan representasi perempuan dalam proses politik; (2) identitas kolektif, berdasarkan identitas ideologi; serta (3) identitas gender dalam konteks agama, afiliasi politik, profesi, kedaerahan, dan kelas.

Isu lingkungan termasuk isu penting setelah isu nasionalisme. Pergerakan isu lingkungan adalah pergerakan yang muncul pasca kemerdekaan. Agak berbeda dari isu poligami, perkawinan anak, perdagangan perempuan, pendidikan perempuan, kesehatan, dan isu hak politik—yang telah menjadi perjuangan panjang gerakan perempuan dari masa pra kemerdekaan—konteks yang mendorong munculnya gerakan perempuan untuk isu lingkungan adalah situasi sosial akibat agresi korporasi global di era pascakolonial. Pemiskinan kawasan yang rentan rusak dan tata kelola sumber daya alam yang eksploitatif, seperti DAS, hutan, pesisir, daerah kaya mineral, kembali muncul di masa membangun. Arena kontestasinya tidak kolektif, identitasnya lokal; sebab ancaman kerusakan dan kebrutalan aksi eksploitasinya berbeda-beda.

**Tabel 1: Gerakan Perempuan Lokal Melawan Ekstraksi Mineral di Indonesia**

Gerakan Sosial Gerakan Perempuan	Lokasi	Ekstraksi Mineral yang Ditolak
Sedulur Sikep Perempuan Kendeng dibawah pimpinan Gunarti	Kabupaten Rembang, Jawa Tengah	Semen/Kars
Perempuan dari Tumpang Pitu	Banyuwangi	Emas
Walhi Gerakan Perempuan	Bengkulu, Jambi, Sumatra Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Barat	Batubara
Perempuan Mollo dibawah pimpinan Mama Aleta Baun	TTS, Gunung Mutis, Mollo - NTT	Batu Marmer Mangan
Masyarakat Amungwe & Komoro Dibawah pimpinan Mama Yosepha	Papua	Emas
Masyarakat Dayak Siang Murung, Bakumpai. Dibawah pimpinan Satarinah	Puruk Cahu, Kalimantan Tengah	Emas
Masyarakat Buyat, dibawah pimpinan Surtini Paputungan dan Zohra Lom- bonaung	Pantai Buyat Sulawesi Utara	Emas
Perempuan Penago Baru dan Rawa Indah, dibawah pimpinan Meli dan Merry	Bengkulu	Pasir Besi
Perempuan Pesisir Pantai Selatan Yogyakarta	Yogyakarta	Pasir Besi
Masyarakat Praikaroku Jangga dan Komunitas Perempuan Paponggu	Sumba Tengah	Emas
Perempuan Luwu Timur	Luwu Timur Sorowako, Sulawesi Selatan	Nikel

Sumber: Berbagai dokumentasi dari situs internet, 2018

Tabel 1 di atas memperlihatkan adanya pergolakan menentang perusahaan tambang, dan fenomena keterlibatan perempuan dalam gerakan anti tambang. Dokumen tentang konflik tambang menunjukkan bahwa kondisi masyarakat di sekitar kawasan tambang adalah kelompok masyarakat yang rentan, termasuk seluruh data pada tabel 1 di atas. Dimulainya aktivitas eksplorasi memunculkan konflik internal masyarakat, pro dan kontra; dan perusahaan cenderung mendapatkan tantangan dari warga lokal. Sayangnya, aksi kolektif pada gerakan anti tambang banyak patah di tengah jalan. Korporasi melakukan konspirasi memainkan janji kesejahteraan kepada warga, sebagian warga mengambil pilihan yang rasional dan berpihak kepada perusahaan. Sementara pada kelompok kontra, menolak adalah satu bentuk kesadaran yang didasari oleh pengalaman dan pengetahuan tentang kelestarian lingkungan. Apalagi, dalam situasi pascareformasi, ketika elemen peluang tersedia lebih lebar untuk terlibat dalam gerakan sosial. Peluang ini juga direspons oleh pasukan gerakan perempuan.

Operasi ekstraksi oleh korporasi multinasional bukan hanya mengancam kekayaan mineral dan kerusakan

lingkungan saja, kegiatan ekstraksi juga menimbulkan gegar pangan lokal. Ancaman berat justru berada pada punahnya berbagai sumber pangan lokal ini. Pengalaman di lokasi eksplorasi tambang emas pada studi ini, yaitu di dusun Paponggu, Desa Praikaroku Jangga, menunjukkan bahwa sumber air, sungai, dan kawasan pertanian sepanjang daerah aliran sungai dengan cepat mendapat polusi. Polusi saat eksplorasi yang berlangsung hanya satu tahun telah membawa korban peracunan air, kematian hewan, dan berbagai penyakit pada manusia.

Kerentanan sumber pangan lokal yang disebabkan oleh penggunaan aneka zat beracun untuk proses ekstraksi mineral, mengubah sistem pengelolaan pangan. Adanya perubahan sistem itu mau tidak mau memicu pergeseran kultur pangan. Semula, desa memang memiliki aneka sumber pangan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari dan komunitas, eksplorasi tambang emas mengubah semua tatanan sosial. Hasil panen pertanian selama setahun selalu diprioritaskan untuk makan keluarga dan dijual sebagian untuk hajatan dan sekolah. Untuk kasus di desa-desa Sumba Tengah, kebutuhan ritual adat jelas lebih penting daripada kebutuhan sekolah anak. Lepas dari itu semua,

dampak operasi ekstraksi mineral sangat luas. Di sinilah titik konflik kepentingan antara aktivitas tambang yang agresif dan kerentanan sumber pangan lokal. Kerentanan pangan lokal menjadi inti dari kemunduran kedaulatan pangan. Rumusan kedaulatan pangan menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2012 menyebutkan negara memfasilitasi kedaulatan pangan melalui kebijakan yang menentukan kemandirian pangan dan menjamin hak atas pangan bagi rakyat, memberi hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai potensi lokal.

Itu sebabnya ada pertanyaan, "Mengapa kerentanan sumber pangan lokal dan pergeseran kultur pangan merupakan isu penting dalam kajian gerakan perempuan anti tambang? Bersamaan dengan kerusakan lahan pertanian akibat tambang, ada pergeseran bahan baku pangan. Kemerosotan bahan pangan lokal memberi kesempatan pangan lain masuk mengisi "kekosongan" pasar dan permintaan lokal. Keluarga-keluarga dari masyarakat yang dulunya berswadaia pangan, menjadi tergantung pada pasokan bahan pangan "pendatang". Kedaulatan pangan serta-merta terancam oleh invasi pangan non lokal tadi.

Perempuan adalah agen penting dalam merespons pertanyaan di atas. Pada konstruksi sosial, perempuan diposisikan memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan makanan keluarga. Pemenuhan itu bukan hanya menyediakan makanan atau tidak, pemenuhan itu juga mencakup kultur pangan. Penyusutan bahan pangan dan air akibat polusi zat beracun, mengubah cara hidup seluruh keluarga dan komunitas. Perubahan dalam rangka penyesuaian itu ada di tangan perempuan. Secara tradisional kedaulatan pangan pada kenyataannya berada pada dominasi perempuan.

Keterlibatan perempuan pada berbagai gerakan anti tambang punya keunikan. Berbeda dari gerakan sosial lainnya, gerakan perempuan memiliki inspirasi perubahan sosial dengan arah tertentu. Melalui banyak bentuk strategi, gerakan perempuan punya agenda rekonstruksi keadilan gender. Perlawanan perempuan dari Desa Praikaroku Jangga juga punya sudut pandang itu. Artikel ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: pesan perubahan apa yang bisa kita "baca" dari gerakan perempuan anti tambang emas di Sumba Tengah? Bacaan terhadap gerakan itu, sekaligus dapat menjelaskan hadirnya fenomena feminis pascakolonial, dan substansi tersembunyi yang terkandung dalam arah gerakan.

## Gerakan Perempuan dan Feminis Pascakolonial

Tujuan besar dari gerakan sosial adalah menciptakan perubahan kelembagaan dan kebijakan negara. Gerakan sosial bersinggungan erat dengan sistem representasi politik, dan berkontribusi terhadap kemampuan partai politik agar melakukan perubahan keputusan publik. Gerakan sosial merupakan elaborasi antara peluang politik, struktur gerakan, dan budaya (Jenkins & Klardermans 1995; McAdam, McCarthy & Zald 1997).

Untuk konteks Asia Tenggara, terdapat satu studi gerakan sosial yang dilakukan oleh Boudreau (2006). Menurutnya terdapat skema segitiga protes sosial, yaitu kesempatan politik, mobilisasi struktur, dan budaya. Segitiga protes sosial dikontrol oleh waktu, ruang lingkup, klaim dan taktis. Boudreau menegaskan pentingnya peluang politik untuk bisa menyampaikan protes; peluang makin luas ketika negara bersifat represif. Peluang politik akan menentukan struktur mobilisasi penyampaian protes, seberapa besar ukuran dan bentuk dari jaringan sosial yang terlibat dalam gerakan. Pertanyaannya, apakah gerakan perempuan anti tambang yang terjadi pascareformasi itu muncul dalam situasi negara yang represif? Atau apakah gerakan ini merupakan fenomena klaim dan taktik?

Rujukan Boudreau di atas adalah narasi besar. Sementara beberapa gerakan lokal anti tambang adalah narasi kecil para perempuan dari kelompok dan kepentingan marginal. Sepertinya dengan mengungkap gerakan perempuan lokal, lingkup narasi kecil ini tampak seperti melompat melewati narasi menengah menuju narasi besar. Barangkali media sosial membantu efektivitasnya untuk menciptakan peluang lompatan. Namun, jelas bahwa gerakan anti tambang berbeda dari gerakan Suara Ibu Peduli (SIP) di masa rezim Orde Baru yang memang memiliki ideologi melawan rezim yang represif (Irianto & Hendrastiti 2015). Pada waktu itu media sosial belum tumbuh, maka kekuatan dan autentikasi gerakannya memenuhi unsur aksi kolektif melawan struktur kekuasaan.

Pembentukan identitas dan kesadaran kolektif dari SIP tampak sangat kuat. Identitas kolektif gerakan perempuan anti tambang memang tidak meluas seperti itu, namun instrumen peluang politik, mobilisasi struktur dan elemen kulturalnya akan sama. Selain itu, ketepatan waktu, ruang lingkup, klaim dan taktik dari masing-masing gerakan sangat tampak. Kemunculan gerakan-gerakan perempuan lokal anti tambang di era pascakolonial menjadi peringatan bahwa kebijakan negara dan arah penguasaan sumber daya mineral oleh

korporasi menjadi ide neoimperialisme. Dengan bahasa yang bervariasi, gerakan perempuan lokal membaca situasi itu dan dari ketimpangan tata kelola itulah muncul aksi protes.

Feminis pascakolonial sangat berhati-hati dalam melihat esensi gerakan perempuan kelompok marginal sebagai gerakan sosial. Dalam diskursus pascakolonial, mereka yang melakukan penolakan terhadap tambang emas di Desa Praikaroku Jangga disebut sebagai kelompok *subaltern* (Spivak 2008). Penelaahan di lapangan, kelompok beridentitas lokal dan tersembunyi itu serupa dengan komunitas perempuan *subaltern*. Kesesuaian identitas *subaltern* itu terutama pada posisinya sebagai komunitas yang secara geografi tersembunyi, berkelas semu, "bisu" atau tidak punya akses ruang bersuara", teropresi dari kekuasaan ekonomi sosial politik, terlupakan dari ruang publik, dan kelompok yang tidak berkelindan dengan diskursus besar gerakan perempuan untuk isu kritis apapun.

Kajian pascakolonial belum terlalu populer di Indonesia. Kalau kita merunut tulisan Harding (1998) asal diskursus pascakolonial dimulai ketika ada kebangkitan dari "*local knowledge tradition*" di Kepulauan Karibia dan India atas ilmu pengetahuan dan teknologi Eropa. Kemudian muncullah ilmu pengetahuan kontemporer yang meninggalkan *non-European cultures*. Studi pascakolonial lalu berkembang dan membawa berbagai ilmu pengetahuan yang sangat berguna dari sejarah dunia ketiga. Tradisi memuja ilmu pengetahuan yang berasal dari "Budaya Eropa" bergeser, dan diperkaya dengan pengakuan terhadap ilmu-ilmu ketimuran. Ashcroft, Griffiths, dan Tiffin (2008), seperti halnya Harding, mengumpulkan karya-karya pengetahuan pascakolonial yang beridentitas multikultural dan sejarah global.

Sudut pandang kritis feminis pascakolonial terhadap gerakan perempuan juga merumuskan dengan jelas tentang: (1) identitas perempuan yang tidak monolitik dalam relasi kuasa (atas dasar kelas, warna kulit, kultural); (2) posisi perempuan dalam konteks negara bangsa; (3) representasi diri perempuan; (4) sejarah, dalam artian pada momentum apa suatu gerakan muncul; (5) apakah gerakan itu "liyan" dari suatu gelombang protes bangsa; (6) ruang publik apa yang tersedia untuk menyuarakan protes. Dari rumusan itu penting untuk melihat bisakah kelompok perempuan anti tambang itu berbicara atas namanya sendiri? (Hendrastiti 2014).

Fenomena gerakan perempuan lokal yang muncul dua dasawarsa ini dimaknai sebagai fakta sosial dan gerakan politik walau tidak dapat disejajarkan dengan gerakan politik perempuan tahun 1998. Memang benar

bahwa aktivitas mereka dapat dikategorikan sebagai suatu gerakan sosial, meski bukan beridentitas narasi besar gerakan perempuan yang tonggak sejarahnya adalah Kongres 1928. Narasi besar Kongres 1928 bertujuan untuk kemerdekaan dan membebaskan perempuan dari kemiskinan dan keterbelakangan. Namun perempuan Kendeng, perempuan Mollo, dan perempuan Praikaroku Jangga dan yang lain, yang memperjuangkan ruang hidupnya melawan industri ekstraksi pencemar lingkungan juga merupakan gerakan. Kalau begitu, pertanyaan tentang bagaimana seharusnya kita merumuskan suatu aktivitas sebagai sebuah gerakan, di bagian yang mana, serta apa agenda politik mereka, adalah pertanyaan penting.

Pendekatan etnografi feminis pascakolonial membantu merangkai analisis atas kajian narasi kecil gerakan perempuan (Hendrastiti 2014; Hendrastiti 2018a; Hendrastiti 2018b). Etnografi di Desa Praikaroku Jangga menghasilkan narasi kecil gerakan perempuan anti tambang. *Fieldtalk* untuk isu tertentu dilakukan beberapa kali secara timbal balik. Kesadaran kritis dari subjek menjadi hal utama dalam narasi, mereka yang bersuara tahu persis hal-hal yang dicatat (dalam *fieldnotes*) akan menjadi publikasi atas gerakannya. Oleh karena itu, narasi terangkai tersebut adalah suatu sejarah perempuan lokal dalam protes tambang (*HerStory*). Untungnya, narasi-narasi itu telah mengarahkan peneliti pada inti analisis feminis pascakolonial, yaitu makna perjuangan, isu yang diperjuangkan, dan bagaimana pasukan di kampung-kampung merangkai kultur perjuangan.

### Metode Etnografi Feminis Pascakolonial

Penelitian ini menggunakan metode etnografi feminis pascakolonial. Metode yang mampu memberi peluang peneliti untuk mendapatkan deskripsi yang komprehensif tentang keterpurukan hidup dari masyarakat terdampak konflik, terutama kelompok perempuan. Ia adalah instrumen bagi peneliti untuk mengungkap pengetahuan dari pengalaman hidup narasumber. Pengalaman yang berbeda-beda sebagai konsekuensi dari ketimpangan relasi kuasa dalam hidup sosiokultural sehari-hari, termasuk ketika terlibat dalam konflik dengan korporasi. Metode ini sekaligus memberi pengayaan makna transenden dan pengetahuan akan agenda tersembunyi dari "mandat" perubahan hidup pasca konflik (Hendrastiti 2018b).

Dari sudut pandang feminis pascakolonial, keterpurukan dalam konteks konflik tambang, dasarnya adalah ketidaksetaraan gender. Selanjutnya, narasi yang disuarakan oleh perempuan Praikaroku Jangga adalah

narasi perjuangan, narasi identitas, dan narasi tuntutan akan pengakuan. Narasi mereka adalah cerita yang terlupakan, cerita yang tersimpan, yang tersembunyi dari publik, serta kenang-kenangan mendalam tentang situasi "tak dianggap penting". Di titik inilah, etnografi "biasa", umumnya, tidak bertemu dengan harapan dan kepentingan kelompok perempuan lokal yang berjuang untuk ruang hidup. Metode yang progresif ini mendorong invisibilitas dari kelompok *subaltern*, sehingga isu penting dari perempuan anti tambang terungkap.

Proses studi berlangsung selama tiga tahun, dari tahun 2016 – 2018. Dengan *fieldwork* sebanyak enam periode. Teknik pengumpulan data selama *fieldwork* adalah *fieldtalks*, *fieldnotes*, observasi, *workshop*, *focus group discussions* (FGD). *Fieldtalks* dilakukan kepada beberapa narasumber yang terlibat dalam bentrok di lapangan, tokoh desa, tokoh adat, dan para mama yang terlibat gerakan perempuan. Observasi dilakukan melalui hidup sehari-hari, dan beberapa upacara adat. *Workshop* bertema identifikasi masalah kritis perempuan Sumba Tengah dilakukan pada tahun ketiga dari studi lapangan. Sementara *focus group discussions* dilakukan tiga kali, yakni dua kali di desa dan satu kali di Waibakul (ibukota Kabupaten Sumba Tengah). FGD yang terakhir melibatkan beberapa mama dari kampung sekitar kota Waibakul. *Fieldnotes*, seperti halnya tradisi etnografi, dilakukan sepanjang proses *fieldwork*.

Analisis studi mengikuti kerangka feminis pascakolonial, terutama dari konsep identitas. Konsep identitas dilihat dari dekonstruksi identitas representasi, menuju ke makna transenden identitas pascakolonial, identitas orang gerakan sebagai subjek, bukan objek. Selain identitas, kebisuan kepentingan menjadi suatu instrumen analisis. Sementara kecakapan strategi gerakan, eksistensi dari kepemimpinan lokal, serta pengakuan adanya perubahan status sosial perempuan dalam tubuh gerakan anti tambang, dari pinggiran ke tengah gerakan adalah aspek lain dalam analisis. Melalui metode *fieldtalk* dan observasi yang berperspektif feminis, maka peneliti memperoleh hasil analisis yang menarik, yaitu pengetahuan mama-mama petani dari desa itu. Pengetahuan perempuan mampu menjelaskan tentang konteks spiritualitas dari lingkungan, tanah dan air.

### **Narasi Perempuan *Subaltern*: Memperjuangkan Ruang Hidup dan Akses Berbicara**

Gerakan perempuan adalah cermin buram demokrasi sebab isu-isu yang dibawa oleh gerakan perempuan adalah isu penindasan kemanusiaan. Selagi demokrasi memberi akses yang setara terhadap perempuan di

tingkat manapun, serta mempertimbangkan afirmasi kepada mereka yang terpuruk (*invisible*), maka perempuan adalah warga yang berkomitmen. Senyatanya, inti demokrasi saat ini mengalami perubahan, ada tuntutan kuat atas diskursus kesejahteraan. Jadi, semua kekuatan politik menawarkan isu kesejahteraan dalam kontestasi politiknya (Hiariej & Stokke 2017). Termasuk dalam perdebatan itu adalah fenomena menantang kebijakan rezim kesejahteraan pemerintah, mempertanyakan format rezim kesejahteraan yang ditawarkan.

Dalam kajian feminis pascakolonial, gerakan perempuan melawan bisnis ekstraksi perlu menggambarkan pengalaman represi yang empirik, sehingga jelas perlawanan dan perjuangannya. Memang benar bahwa gerakan perempuan bernarasi besar dengan ideologi melakukan perubahan besar ke arah kesejahteraan, dan ditujukan kepada semua perempuan secara inklusif dan lintas batas. Keberadaan narasi besar itu berbeda dengan fenomena gerakan perempuan di tingkat lokal pada umumnya, dengan identitas perempuan yang tersembunyi, tak terdengar, tidak dianggap penting, dan kepentingannya berada di luar *agenda setting* kebijakan negara. Itulah narasi perempuan *subaltern*.

Jika demikian, maka gerakan perempuan anti tambang perlu dirumuskan. Apakah gerakan mereka untuk memperjuangkan kepentingan komunitas perempuan kelas bawah? Bila mereka identik dengan rakyat jelata, *subaltern*, di mana relasi dan perjumpaan mereka dengan gerakan masyarakat sipil? Penting untuk melihat gerakan masyarakat sipil, karena mereka adalah perantara dan jembatan menuju inti kebijakan negara atau publik.

Namun, tentu saja di masa disrupsi seperti saat ini, kemungkinan rumusan gerakan sosial mengalami metamorfosa, termasuk gerakan perempuan. Apakah gerakan politik perempuan sudah berubah menjadi gerakan politik monolitik seperti gerakan anti tambang? Perkembangan informasi dan teknologi pasti mengambil peran penting dalam gerakan itu.

### *Narasi Rumusan Identitas*

Seperti telah disebutkan di atas, Punggung bukit Paleti Alira menjadi medan tempur antara pasukan warga desa dan korporasi. Desa Praikaroku Jangga adalah sebuah desa yang jauh dari pelayanan publik. Jarak menuju desa sesungguhnya bisa ditempuh dengan waktu yang relatif pendek, namun menjangkaunya memakan waktu. Fakta ini menunjukkan bahwa akses pelayanan transportasi

bagi warga desa, hampir di seluruh pedalaman desa di Sumba, memang rendah. Rendahnya akses transportasi itu menjadi penyebab dari banyaknya persoalan kritis perempuan.

Pengalaman *fieldwork*: pertama, identifikasi atas memori/pengalaman perempuan terlibat dalam gerakan. Pada tahap ini ada beberapa kali diskusi maupun *in-depth interviews*, berkaitan dengan sejarah dan momentum dimulainya perlawanan, dan relasi kuasa yang mendasari munculnya gerakan. Perempuan merumuskan sendiri di mana posisi perempuan dalam konteks gerakan perlawanan anti tambang itu.

Tahap yang kedua adalah melakukan *workshop* bagi perempuan. Peserta *workshop* diperluas ke desa marginal lain di Sumba Tengah, terutama dari Balai Perempuan yang didirikan atas pengorganisasian Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Sumba Tengah. Pertemuan itu memperlihatkan keberdayaan dan solidaritas perempuan, terutama dalam menyuarakan kepentingannya. Perempuan merumuskan sendiri persoalan, dan rangkaian masalah atas posisi marginalnya. Bagi studi etnografi, forum *workshop* menemukan narasi gerakan lokal yang sangat kuat. Representasi diri perempuan sebagai subjek menjadi bagian penting dari analisis feminis.

Tahap ketiga adalah audiensi dengan parlemen lokal. Jalan panjang menuju Gedung Parlemen Kabupaten bukanlah jalan yang mudah. Forum audiensi yang pertama kali dilakukan oleh perempuan Sumba Tengah selama 10 tahun sejak adanya parlemen daerah itu merupakan "penemuan" ruang publik bagi perempuan. Dalam bahasa Homi Bhabha seperti dikutip Mangjililo (2015) disebut sebagai ruang ketiga, yaitu tempat komunitas tertindas menemukan ruang yang tersedia untuk menyuarakan protes.

Penelusuran identitas personal dilakukan melalui *focus group discussion* dengan membuat gambar. Proses penelusuran melalui gambar ini sangatlah menarik. Waktu dimulai, narasumber mulai dari keragu-raguan dan perasaan tak mampu menggambarkan diri sendiri. Lama-kelamaan para perempuan pejuang itu percaya diri untuk membuat gambar yang mewakili pikirannya. Intinya bukan gambar yang bagus, tetapi tutur di balik gambar itu. Dalam *fieldwork*, proses ini menjadi jalan pembebasan identitas.

Temuan penting dari identitas: setelah membacakan makna gambar, semua perempuan bersorak-sorai dengan suara keras, suatu gambaran selebrasi pembebasan pikiran dan wicara. Peneliti merasakan suasana haru biru

dan kegembiraan yang mendalam dan turut merayakan selebrasi atas keberhasilan mama-mama meraih ruang bicara. Selain itu yang lebih menggembirakan adalah pembauran antara perempuan bangsawan dengan perempuan biasa dalam forum. Meski bukan lompatan budaya ke arah egaliter, namun suasana setara ternyata memberikan kegembiraan yang sama bagi semua perempuan.

Rentang visual identitas diri ternyata sangat luas dan bervariasi. Setidaknya ada visual tentang pagar, konde, aneka kerajinan, pohon, air, rumah adat, penerangan listrik, jalan, kebun, ikan. Mendengarkan para mama menjelaskan makna gambar visual tentang identitas, peneliti seperti digiring memasuki area di mana perempuan sangat dekat, mengetahui secara detail, dan menyimpan kisi-kisi "kuasa" di dalamnya. Cara mereka menyiasati keterbatasan aset dan akses, baik terhadap sumber materi dan sumber daya alam, telah memberi pelajaran tentang adanya pengetahuan yang tersembunyi. Fenomena *subaltern* dalam konteks feminis pascakolonial terbentang terang selama *fieldwork* berlangsung.

Visual identitas diri itu menjadi simbol dari narasi yang penting, misalnya, ada gambar pagar. Perempuan memberikan makna pagar sebagai metafora kedaulatan pangan. Mereka percaya bahwa di dalam pagar ada kepastian ketersediaan bahan pangan sehari-hari. Selain sayuran, ternak juga berada di dalam pagar. Inti dari jaminan pemenuhan kebutuhan pangan dari rumah adat dan keluarga besarnya, bukan untuk komersial, melainkan untuk berdikari dan swadaya pangan.

Berikutnya muncul gambar konde. Konde mengisyaratkan simbol tentang kekuatan perempuan dan pluralisme. Meski identitas primordial disebut-sebut secara jelas, misalnya "... sebagai perempuan Sumba ... dst", tetapi ada identitas lain yang sangat kuat pada penjelasan para perempuan itu, yaitu rambut. Rambut, baik dikonde, digerai, rambut panjang maupun potong pendek menunjukkan identitas heterogenitas perempuan. Di balik simbolisme adat yang kuat, ada identitas perempuan yang lebih kuat lagi, yaitu tubuh dan representasinya yaitu rambut.

Gambar pohon – visual pohon hadir mewakili pengalaman keseharian perempuan "berelasi" dengan pohon dan hutan. Kedekatan perempuan dengan alam, telah merumuskan dirinya sebagai perawat pepohonan dan hutan. Hutan harus tetap ada, pohon-pohon adalah identitas hutan. Hutan adalah paru-paru dunia. Kosmologi pohon sebagai penghuni hutan, dan oleh karenanya hutan beridentitas paru-paru dunia telah

mengikat perempuan untuk menjaga keberlanjutan identitas itu. Identitas perempuan sebagai bagian dari hutan adalah gambaran yang autentik dan pengakuan diri yang paling mendasar. Kepercayaan dan kesetiaan terhadap simbol perempuan sebagai perawat alam dipahami bukan hanya sebagai tugas yang diberikan oleh masyarakat dan penguasa atau sebagai konstruksi sosial, melainkan ada komitmen dan kekuatan terdalam perempuan sebagai agensi.

Identitas air – diskusi tentang narasi air cukup panjang dan kuat. Membaca narasi ini membuat kita masuk ke dalam analisis feminis. Dimulai dari konstruksi tentang tugas ibu menyediakan air yang bersih bagi keluarga. Perempuan harus menemukan sumber air yang bersih. Salah satu faktor adat yang prinsip bagi perempuan di kampung adalah air. Di Kampung Manatala, kawasan paling tinggi dari Desa Praikaroku Jangga, yang menjadi kebutuhan mama-mama adalah air. Siang dan malam, perempuan harus bergumul dengan air. Dalam narasinya para mama punya visi bahwa perempuan Indonesia mampu bergandeng tangan, memikirkan kebutuhan prioritas hidup sebagai perempuan, yaitu air. Hal ini karena pengalaman laki-laki berelasi dengan air berbeda dari perempuan.

Rumah adat – narasi rumah adat Sumba dari sudut pandang perempuan: rumah orang Sumba harus tinggi, karena rumah mewakili budaya Sumba yang tinggi. Rumah adat adalah tempat bapak dan ibu hidup bersama dan membiayai kebutuhan keluarga. Konteks rumah adat itu luas, termasuk aset dan bahan pangan keluarga seperti sawah, padi hasil sawah, pengelolaan sumber daya manusia/curahan tenaga dan waktu anggota keluarga. Perlu pengaturan dan kerja sama antara suami dan istri, serta anak-anak, dan *ata* (tenaga kerja yang secara turun-temurun menjadi milik keluarga bangsawan tertentu). Dalam perbincangan sehari-hari, secara sosial sering disebut sebagai hamba). Di bawah rumah, menurut salah satu gambar, ada mama menenun—sepanjang *fieldwork* perempuan menenun di teras rumah, bukan di kolong rumah. Siang-siang para mama itu di bawah kolong rumah untuk menenun. Menenun adalah suatu perjuangan bagi perempuan Sumba.

Di rumah rata-rata kelompok mama di kampung Sumba membuat kerajinan anyaman, aksesoris kerang, serta bahan lain dari sekitar rumah dan kebun di saat tidak bertani. Bagi mereka, makna kerajinan lokal adalah narasi yang menjelaskan mengenai prinsip keswadayaan dalam pangan dan sandang. Walaupun secara implisit fenomena ini juga menunjukkan bahwa sikap keswadayaan itu adalah respons dari rendahnya akses ke berbagai pasar di mana

mereka bisa membeli aneka barang kebutuhan hidup. Semangat dan kebanggaan memenuhi sendiri kebutuhan hidup ini sangat mengagumkan, sehingga orang-orang yang datang justru ingin memiliki karya mereka.

Diantara gambar identitas, mama menggambarkan penerangan listrik. Ini menimbulkan pertanyaan tentang alasan gambar penerangan listrik sebagai identitas. Cahaya memiliki banyak fungsi dan manfaat. Bukan saja cahaya matahari, tetapi yang kritis saat ini penerangan listrik. Penjelasan itu memberi pengetahuan kepada peneliti bahwa identitas adalah hal yang berkenaan dengan masalah yang paling kritis dalam hidup perempuan, di samping kekuatan yang telah dimiliki. Menurut para mama, di Sumba Tengah orang-orang tidak pernah peduli tentang penerangan. Selama ini di kampung-kampung, anak usia sekolah banyak tetapi sebagian dari mereka tidak mau bersekolah karena tidak bisa belajar. Beberapa anak-anak belajar dengan lampu minyak tanah yang menyakitkan mata, apalagi bagi anak-anak kecil. Listrik adalah salah satu prioritas yang dibutuhkan oleh warga kampung. Banyak bapak tidak memikirkan hal itu secara serius, mereka sering mondar-mandir pulang malam. Mama-mana sangat menderita karena membutuhkan penerangan.

Fasilitas jalan disebut sebagai visual identitas perempuan. Peta desa menunjukkan bahwa untuk mencapai pemukiman desa, perlu menggunakan fasilitas jalan antar kabupaten, Sumba Barat ke Sumba Tengah. Di lintas Sumba Tengah masuk ke desa Praikaroku. Jalan masuk desa—yang melewati punggung bukit Paleti Alira—sudah lama rusak, jalan aspal kasar. Keterbatasan fasilitas jalan umum ini punya dampak ke berbagai kesulitan lain, misalnya guru jarang datang ke sekolah dasar. Guru ASN (Aparatur Sipil Negara) tidak ada, hanya terdapat beberapa orang guru honorer yang berasal dari dekat kampung. Bahkan mereka mengajar kurang lebih sampai jam 10. Siswa sekolah datang sesuka hatinya. Dampak lain berkaitan dengan kesehatan reproduksi perempuan serta pemasaran hasil pertanian.

#### *Analisis Feminis Pascakolonial*

Identitas perempuan adalah rumah, air, pagar, kebun, pohon, ikan, jalan, penerangan listrik. Orientasi utama adalah rumah; rumah adalah tempat semua anggota keluarga kembali. Rumah adat adalah kekuatan keluarga, rumah menyediakan keselamatan, keamanan, kenyamanan, relasi kasih sayang, kesejahteraan, perlindungan. Di dalam rumah tak ada lagi rasa lapar, tak ada lagi rasa takut, rumah adalah kehangatan dan kehormatan. Semua harta pusaka dan kekayaan keluarga

tersimpan di dalam rumah adat, demikian juga hasil bumi dan pertanian. Rumah adat juga menjadi perlindungan bagi hamba dan hewan keluarga. Di situlah identitas perempuan berlabuh, simbol tentang rumah sebagai domain perempuan adalah salah satu konstruksi dari kolonialisme. Diskursus relasi perempuan dan laki-laki mengikuti alur berpikir dikotomis yang tertanam melalui kelindan berbagai struktur sosial, kultural (adat), ekonomi dan politik (negara), serta praktik agama.

Selain itu, diskursus relasi perempuan dan laki-laki dalam konteks perkawinan dan rumah tangga berada pada tahap "kesadaran magis" atau *false consciousness*. Hingga sekarang, kesadaran perempuan atas relasi perkawinan dan kemandirian perempuan sebagai subjek dan agensi sumber daya alam tidak statis, naik turun dan situasional menurut kelas, geografi, kasta, dan pendidikan/pengetahuan. Di satu sisi mereka percaya bahwa relasi harmoni suami dan istri harus bekerja sama, jika laki-laki bilang A, maka perempuan juga bilang A. Bukan laki-laki bilang A, perempuan bilang B, ini tidak harmonis bagi rumah tangga. Hal ini merupakan diskursus utama. Sementara itu, wacana tentang kemandirian perempuan dalam berpikir dan bersuara juga eksis dan menguat. Pemikiran itu menunjukkan bahwa perempuan berada di simpang jalan, sangat sulit untuk berpaling dari kekuatan adat, tetapi realitas yang mereka hadapi adalah benturan budaya yakni kesadaran kritis adanya ketidakberuntungan di pihak perempuan terasa nyata. Inilah tanda-tanda fenomena feminis pascakolonial ada.

Konteks sosiokultural di Sumba Tengah, terdapat rumusan tentang perbedaan kepentingan dan pemikiran perempuan dari laki-laki. Meski air, ketersediaan pangan, energi listrik untuk penerangan, transportasi jalan, sekolah anak, adalah kebutuhan semua orang, tetapi mama-mama dari berbagai kampung paling tepat dalam merumuskannya. Mama-mama menyadari bahwa tata sosial meletakkan tanggung jawab tersebut secara tradisional kepada perempuan. Menurut aturan adat, dalam pertemuan perempuan harus di belakang, mereka ada di dapur. Akhirnya perempuan tidak mampu bersuara dalam bentuk apapun. Kesadaran magisnya memperlihatkan kesan perempuanlah yang wajib memenuhinya. Kesadaran kritisnya "memprotes" ketidaksetaraan tugas *vis a vis* laki-laki.

Sebagai identitas perempuan, kebun misalnya, adalah menawarkan kesuburan, produksi bahan pangan, dan garansi keberlanjutan kehidupan. Kebun juga simbol dari perjuangan, pertahanan, kerja keras, inovasi dan tanggung jawab. Kebun adalah sebuah janji kehidupan.

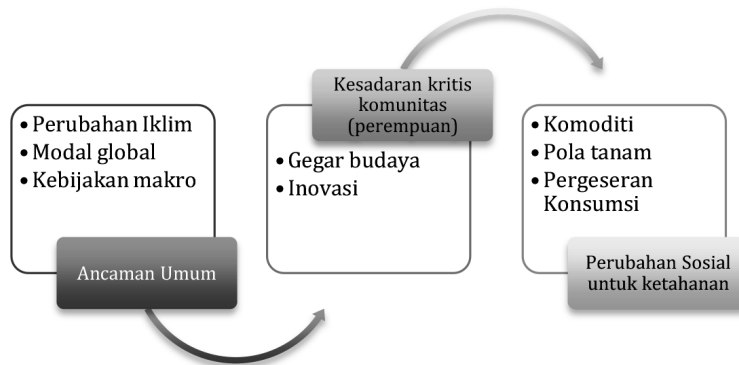
Mama-mama berpikir bahwa setiap hari ketika mereka bangun dan pergi ke dapur di sana ada ayam, ada babi, ada sayur. Sebaliknya, bapak-bapak bangun pagi bisa minum kopi. Perempuan bisa dimarahi oleh laki-laki jika misalnya lauk tidak ada. Menurut mereka, perempuan seharusnya tidak dimarahi. Mama-mama merasa bahwa pengalaman-pengalaman perempuan itu hebat. Perempuan itu cerdas, perempuan punya kemampuan yang luar biasa. Dalam satu kesempatan perempuan bisa melakukan beberapa aktivitas dalam satu waktu. Contohnya, ketika perempuan memasak, ia juga bisa menggendong anaknya di punggung/belakang. Kerja masak-memasak tetap berjalan meski ada tugas mengasuh anak. Perempuan memang hebat luar biasa dan ini harus diakui oleh perempuan sendiri.

Narasi kesadaran diri (*self-consciousness*), sering kali perempuan tidak menjadi prioritas. Mama-mama menghimbau agar negara dan organisasi perempuan dapat membantu perjuangan mereka, karena mereka mau menjadi perempuan yang maju dan tidak seperti yang dikatakan oleh laki-laki.

Mama-mama merasa perempuan harus mampu berjuang dalam bentuk apapun. Walaupun dalam rumah tangga, tetapi mereka juga harus mampu, perempuan punya tanggung jawab. Perempuan harus bertekad, bersuara dan mampu melakukan sesuatu hal demi kepentingan bersama dalam kehidupan masyarakat luas, bukan hanya soal keluarga. Perempuan punya daya pikir yang cukup tinggi, bahkan mampu melakukan banyak hal. Alasan itu tak menyebabkan perempuan selalu menundukkan diri dari laki-laki. Laki-laki lebih maju lagi, supaya perempuan juga menjadi lebih kuat dan mampu melakukan sesuatu hal yang lebih baik untuk masyarakat.

Narasi feminis pascakolonial di atas menjadi dasar dari analisis gerakan pascakolonial. Proses mempersatukan kepentingan adalah suatu gerakan memantapkan agregasi. Pernyataan tentang "... siapa yang bisa kasih kalah itu perempuan ..." adalah narasi yang dibangun perempuan untuk bangkit dan melawan, mencari ruang baru untuk mendapat pengakuan hak.

Narasi-narasi itu menunjukkan bahwa ada kesadaran baru tentang pentingnya perempuan merebut ruang pengambilan keputusan publik. Gerakan menuju era kepemimpinan perempuan dari kampung-kampung sedang terjadi. Dari kampung menuju lokus pengambilan keputusan publik, bernuansa keadilan dan kesejahteraan. Narasi itu saling melengkapi dan secara komprehensif menjelaskan irisan feminisme tentang fenomena sosial dari masyarakat marginal.



Gambar 1: Kedaulatan Pangan dan Lokalitas  
 Sumber: diolah penulis berdasarkan hasil *fieldwork*

Gambar 1 di atas membantu kita memahami gerakan perempuan anti tambang yang mengarah ke gerakan kedaulatan pangan lokal. Di samping terlibat pada pengusiran korporasi tambang emas, sesungguhnya ada agenda inti lain dari para mama, yaitu berjuang untuk mencapai kedaulatan pangan. Berjuang untuk mendapatkan ruang bicara tentang pentingnya kampung-kampung berdaulat dalam pangan. Pengakuan terhadap usaha perempuan sehari-hari memastikan adanya bahan pangan lokal yang siap stok adalah bagian terpenting dari perjuangan mereka.

### Memandang Perempuan Etnis Sendiri & Perdebatan Identitas

Fenomena feminis pascakolonial juga ditemukan pada salah satu tahap koleksi data selama *fieldwork*, yaitu audiensi dengan DPRD Kabupaten Sumba Tengah. Perdebatan antara kelompok perempuan dan wakil rakyat pada pertemuan audiensi amatlah menarik. Setelah melalui proses panjang studi, diskusi dan penguatan—ketidakpercayaan diri hingga keberdayaan berbicara, kesulitan keluar rumah hingga kemudian mengusulkan diri untuk ikut bicara—pada akhirnya semua berbuah manis.

Pada audiensi tersebut, mama-mana ingin bicara soal sumber daya alam sebab mama-mama turut merawat alam. Selanjutnya tampak mama-mama fokus pada tata kelola air, keterlibatan mereka pada pengelolaan air, supaya air tetap bersih, baik, dan aman untuk keluarga, untuk anak-anak, pertanian, dan hewan. Semuanya bersangkutan paut dengan hidup perempuan dan lingkungan.

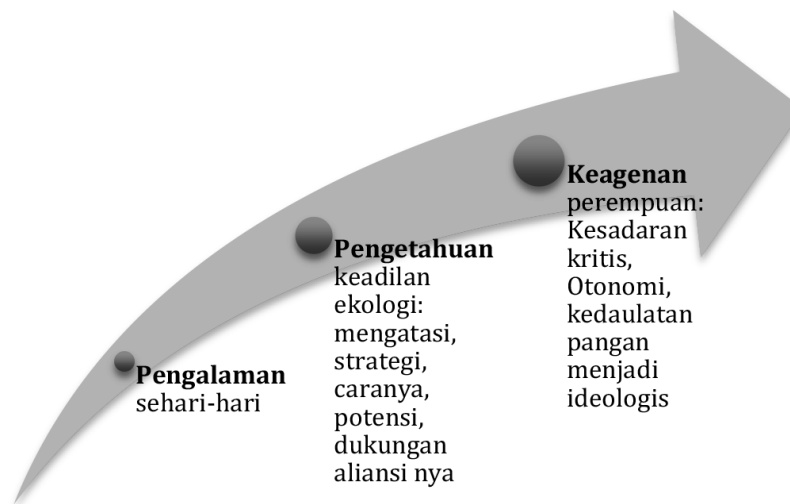
Pada pertemuan audiensi antara mama-mama dan DPRD tersebut, DPRD berusaha untuk mendengarkan suara mama-mama. Ada kesungguhan untuk mengatur waktu diantara padatnya jadwal DPRD dan jeda waktu mengundang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kabupaten. Dewan diingatkan bahwa tahun 2012

terdapat konflik tambang emas di Perbukitan Paleti Alira. Informasi tentang keterlibatan perempuan dalam aksi penolakan operasi korporasi tambang menjadi dasar bagi DPRD untuk mengundang OPD terkait, yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Diskusi dengan wakil rakyat terasa bersemangat karena perempuan mendesak dan memastikan aspirasinya didengarkan karena wakil rakyat dinilai kurang bekerja dengan sungguh-sungguh dan memikirkan kepentingan kaum perempuan. Isu kritis yang disuarakan di gedung DPRD sama seperti identitas yang sudah digambarkan, yaitu kesehatan perempuan dan anak, pengelolaan sumber air, jalan, penerangan listrik, proteksi terhadap aktivitas perusahaan yang mengancam hidup masyarakat Sumba.

Parlemen menanggapi bahwa perempuan harus belajar lagi, sehingga bisa menjadi partner penting bagi pemerintah dan parlemen. Tantangan itu dijawab oleh peserta audiensi, mereka menjelaskan bahwa perempuan mampu bersuara, bekerja sama, mengorganisasi diri dalam organisasi, belajar berkoalisi dan berjuang. Akses ruang menyuarakan pendapat memang masih sulit untuk dicapai. Melalui organisasi juga tidak mudah menembus akses menyampaikan pendapat.

Narasi debat di ruang sidang parlemen menunjukkan adanya narasi perempuan dalam membangun kekuatan, menggerakkan banyak pihak, dan menyuarakan kepada forum yang lebih luas. Ini adalah salah satu temuan studi yang berharga, yakni kelompok *subaltern* berusaha menembus ruang bicara dan membentuk ruang ketiga. Ruang-ruang bicara ini bukan hanya bermakna suatu kesempatan, melainkan juga hasil perjuangan identitas menembus ruang pengakuan yang sebelumnya tidak ada, perjuangan identitas perempuan sebagai agensi. Gambar 2 di bawah membantu kita memahami alur pengakuan terhadap perempuan “menjadi” agensi.



Gambar 2: Identitas Perempuan sebagai Agensi  
Sumber: diolah penulis berdasarkan hasil *fieldwork*

## Penutup

Analisis dan dokumentasi tentang tata kelola sumber daya alam berbeda melalui pendekatan feminisme. Melalui praksis analisis gender dan menjelaskan keberadaan perempuan serta pengalaman dan pengetahuannya, maka tampak situasi yang sebenarnya terjadi dan risikonya. Perempuan ada di setiap tahap, tetapi kadang diceritakan kadang tidak. Perempuan dalam tata kelola sumber daya alam seperti kelompok terabaikan atau *ignorance groups*. Meski sebenarnya di setiap tahapan terdapat proses penguatan kesadaran melawan yang dalam diskursus gerakan sosial disebut sebagai kesadaran politik. Freire dan Mendes menyebut masuknya komunitas untuk melawan penindasan adalah kualitas kesadaran

Feminisme memberi jalan keluar yang menyeluruh, setidaknya memperluas kajian sosial tentang sketsa hidup masyarakat dan posisi perempuan. Feminisme pascakolonial memperkaya cara pandang keagenan perempuan: (1) kesadaran kolektivitas dalam menyuarakan kepentingan—merumuskan konsep gerakan perempuan. (2) Gerakan perempuan lokal menggugat maskulinitas, yang tidak memikirkan kebutuhan prioritas rumah, anggota keluarga, anak-anak. Dikotomi “urusan” mama-mama dan laki-laki telah menghambat pencapaian kesejahteraan. Dikotomi yang penuh mitos itu justru menjauhkan visi “harmoni” dalam keluarga dan komunitas. Ajaran tentang perempuan sebagai tiang keluarga, tiang komunitas dan tiang negara, hanyalah slogan. Tiang tanpa kekuatan hanyalah kebohongan. (3) Mama-mama menggugat bapak-bapak dan pemerintah yang tidak pernah mau mengakui bahwa perempuan sudah hebat. Mereka berharap dalam

setiap pertemuan perempuan bisa memperkuat diri dan tidak merasa tak berdaya. Organisasi perempuan independen harus tetap ada, tetap hidup untuk menemani mama-mama berjuang. Mereka menawarkan untuk menyuarakan bahwa perempuan harus bersama-sama mendobrak, dan menyatakan kepada khalayak luar bahwa perempuan adalah sosok hebat.

Advokasi tidak menempatkan perempuan sebagai unsur pelengkap dan pemanis, tetapi menjadi unsur utama dalam perubahan kebijakan yang hendak diraih. Pengetahuan perempuan harus menjadi standar dasar dalam perancangan pendidikan kritis. Pada tahap inilah pentingnya pendidikan kritis warga. Aktivisme seperti perundingan, jejaring, kongres merupakan ruang untuk membangun kesadaran politik. Yang penting untuk dipertimbangkan bahwa pendidikan kritis perempuan tidak hanya dipersiapkan untuk politik elektoral. Pendidikan untuk perempuan mesti menguatkan kesadaran.

## Daftar Pustaka

- Ashcroft, B, Griffiths, G & Tiffin H (eds.) 2008, *The Post Colonial Studies Reader*, Second edition, Routledge, London-New York.
- Blackburn, S 2010, *Perempuan dan Negara dalam Era Indonesia Modern*, Kalyanamitra, Jakarta.
- Boudreau, V 2006, *Resisting Dictatorships: Repression and Protest in South East Asia*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Harding, S 1998, *Is Science Multicultural? Postcolonialism, Feminism, and Epistemologies*, Indiana University Press, Bloomington and Indianapolis.
- Hendrastiti, TK 2014, *Perempuan Lokal vs Tambang Pasir Besi Global*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Hendrastiti, TK 2018a, *Ragam Identitas Perempuan Bukan Bayang-Bayang: Menguatkan Konstruksi Nasionalisme*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Hendrastiti, TK 2018b, Offering The Ethnographic Feminist Method To The Public Administration Inquiry, AAPA 2018 Conference Proceeding, Atlantis Press, DOI <https://doi.org/10.2991/aapa-18.2018.46> How to use a DOI?

Hiariej, E & Stokke, K 2017, "Introduction: Politics of Citizenship in Indonesia", dalam E Hiariej & K Stokke (eds.), *Politics of Citizenship in Indonesia*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, PolGov Fisipol UGM dan University of Oslo, Jakarta, hh. 1-22.

Irianto, S & Hendrastiti, TK 2015, "Gerakan Perempuan Indonesia: Perjuangan Keadilan dan Keadilan yang Hilang dari Sejarah", dalam S Irianto (ed.), *Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak*, USAID, The Asia Foundation, Kemitraan Partnership, Jakarta, hh. 2-47.

Jenkins, JC & Kladermans, B (eds.) 1995, *The politics of Social Protest: Comparative Perspectives on State and Social Movements*, University of Minneapolis Press, Minneapolis.

Mangililo, I 2015, "Bumi sebagai Tubuh Manusia: Studi kasus perempuan Moloo Melawan Tambang Mangan", dalam D Candraningrum & Hunga, AIR (eds.), *Ekofeminisme III: Tambang, Perubahan Iklim, dan Memori Rahim*, Jalasutra, Yogyakarta, hh. 173-185.

Martyn, E 2005, *The Women's Movement in Post-colonial Indonesia Gender and nation in a new democracy*, Routledge Curzon, London – New York.

McAdam, D, McCarthy, J & Zald, MN 1997, *Comparative Perspective on Social Movements: Political, Mobilizing Structure, and Cultural Framing*, Cambridge University Press, Cambridge.

Spivak, GC 2008, "Can Subaltern Speak?", dalam B Ashcroft, G Griffiths & H Tiffin (eds.), *The Post Colonial Studies Reader*, Second edition, Routledge, London-New York, hh. 28-37.

"Warga Serang Pekerja Tambang Emas di Sumba Tengah" 2011, *Suara Pembaharuan*, 11 April, <https://sp.beritasatu.com/home/warga-serang-pekerja-tambang-emas-di-sumba-tengah/5421>

## **Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari**

1. Prof. Sylvia Tiwon (University of California, Berkeley)
2. Dr. Widjajanti M Santoso (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)
3. Ro'fah PhD. (UIN Sunan Kalijaga)
4. Dr. Pinky Saptandari (Universitas Airlangga)
5. Dr. Atnike Nova Sigiro (Universitas Paramadina)
6. Ruth Indiah Rahayu, M. Fil. (Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara)
7. Mariana Amiruddin, M. Hum. (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)

## ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

**Jurnal Perempuan** (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan menguraikan persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, autentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada ([redaksi@jurnalperempuan.com](mailto:redaksi@jurnalperempuan.com)).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan subbagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa subbab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam subbab-subbab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan/atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/ temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Akhir** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum 2003) untuk dua pengarang, (Candraningrum, Dhewy & Pratiwi 2016) untuk tiga pengarang, dan (Arivia et al. 2003) untuk empat atau lebih pengarang. Contoh:  
Arivia, G 2003, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.  
Amnesty International (AI) 2010, *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*, diakses pada 5 Maret 2016, [http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational\\_for\\_PSWG\\_en\\_Indonesia.pdf](http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf)  
Candraningrum, D (ed.) 2014, *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.  
Dhewy, A 2014, "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election", *Indonesian Feminist Journal*, vol. 2 no. 2, h. 130-147.  
"Sukinah Melawan Dunia" 2014, *KOMPAS*, 18 Desember, diakses 20 Desember 2014, <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi [redaksi@jurnalperempuan.com](mailto:redaksi@jurnalperempuan.com) untuk mendapatkan petunjuk.

YAYASAN  
**YJP**  
JURNAL  
PEREMPUAN

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A  
Jati Padang, Pasar Minggu,  
Jakarta Selatan 12540  
INDONESIA  
Phone/Fax: +62 21 22701689

**MAMPU** | Kemitraan Australia - Indonesia  
untuk Kesetaraan Gender  
dan Pemberdayaan Perempuan

 **FORDFOUNDATION**

